

Pemilu 2024: Menyelamatkan Demokrasi dari Ancaman Radikalisme

written by Hafid Salafudin



[Harakatuna.com](https://www.harakatuna.com) – Pesta demokrasi nasional kurang lima hari lagi. Pemilu 2024 merupakan momen krusial bagi keberlanjutan demokrasi di tengah bayang-bayang ancaman radikalisme yang semakin masif. Dinamika sosial dan politik global telah menciptakan lanskap baru yang memerlukan kewaspadaan tinggi dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Di tengah kebebasan bersuara dan hak untuk memilih, masyarakat dihadapkan pada tantangan serius yang datang dalam wujud ideologi radikal yang dapat merongrong fondasi dasar negara demokratis.

Dalam menyikapi ancaman ini, penting bagi seluruh elemen masyarakat untuk memahami akar permasalahan dan mengevaluasi strategi yang dapat menjaga integritas demokrasi. Salah satu titik fokus utama adalah peran media dalam memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan seimbang kepada masyarakat.

Media sebagai penjaga demokrasi memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan ruang bagi berbagai perspektif tanpa memihak, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dan proses pemilu.

Keberlanjutan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pemerintah, namun juga tanggung jawab bersama masyarakat. Pendidikan politik menjadi elemen kunci dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga demokrasi dan mengenali tanda-tanda radikalisme. Program-program pendidikan yang holistik, mencakup literasi politik dan sosial, dapat membantu membangun daya tahan masyarakat terhadap pengaruh radikalisme.

Pemilu sebagai puncak demokrasi harus dijalankan dengan transparan, adil, dan bebas dari intervensi radikal. Keamanan dalam proses pemilu menjadi aspek vital, dan perlu adanya kerja sama antara aparat keamanan, lembaga pemilihan, dan masyarakat dalam menjaga integritas Pemilu. Penggunaan teknologi yang cerdas dalam pemilu juga perlu diterapkan, dengan memastikan keamanan data dan menjaga integritas hasil pemungutan suara.

Dalam era digital, media sosial menjadi arena utama perdebatan politik dan penyebaran ideologi radikal. Oleh karena itu, perlunya regulasi yang cerdas untuk mengendalikan penyebaran informasi yang dapat memicu radikalisme. Namun, regulasi tersebut juga harus menjaga kebebasan berekspresi dan menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Keberlanjutan demokrasi di masa depan memerlukan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik.

Peran kelompok masyarakat sipil, organisasi nirlaba, dan individu-individu yang peduli terhadap nasib bangsa sangat penting dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Proses keterlibatan ini dapat diwujudkan melalui dialog terbuka, forum diskusi, dan kampanye pendidikan politik.

Dalam menghadapi Pemilu 2024, pertimbangan yang matang terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi menjadi kunci dalam merancang strategi menjaga keberlanjutan demokrasi. Perubahan global, termasuk dampak pandemi Covid-19, telah memberikan tekanan ekstra terhadap proses Pemilu. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemilu harus mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah, memastikan keselamatan masyarakat, serta meminimalkan risiko intervensi radikal.

Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan yang tak

tergantikan. Lembaga-lembaga pemilihan harus menjalankan fungsi mereka dengan integritas tinggi, memberikan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu melalui dialog terbuka dan keterlibatan aktif dapat membantu memperkuat fondasi demokrasi.

Sangat Penting untuk mencermati bagaimana media berperan dalam membentuk opini publik. Keterbukaan media dalam melibatkan berbagai suara dan menghadirkan konten yang berimbang dapat membentuk pola pikir masyarakat yang kritis. Redaksi yang bertanggung jawab dan independen akan menjadi penjaga utama dalam mencegah penyebaran ideologi radikal melalui saluran berita.

Adanya kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Meskipun teknologi memberikan kemudahan akses informasi, namun juga membawa risiko penyebaran hoaks dan disinformasi. Penguatan literasi digital dan keamanan siber menjadi bagian integral dalam persiapan pemilu, sehingga masyarakat dapat memilah informasi dengan bijak.

Dalam hal ini, partisipasi masyarakat sipil menjadi sangat krusial. Organisasi-organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, dan individu-individu yang memiliki kepedulian terhadap demokrasi dapat memainkan peran aktif dalam memastikan Pemilu berjalan dengan lancar dan tanpa intervensi radikal. Pendidikan politik menjadi instrumen efektif untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memahami hak-hak mereka dan berperan dalam proses demokratis.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan ruang bagi dialog antarberbagai pihak. Dialog terbuka antara pemerintah, partai politik, masyarakat sipil, dan sektor swasta dapat membangun pemahaman bersama dan menciptakan solusi kolaboratif. Kerja sama lintas sektor ini akan menciptakan iklim yang kondusif bagi demokrasi yang inklusif dan dinamis.

Dalam menjaga keberlanjutan demokrasi, langkah-langkah preventif juga harus diterapkan. Identifikasi dini terhadap potensi radikalisasi, baik di ruang digital maupun fisik, dapat membantu mengurangi risiko ancaman terhadap stabilitas demokrasi. Kolaborasi antara pihak berwenang, lembaga intelijen, dan masyarakat dapat membentuk pertahanan yang solid terhadap penetrasi ideologi radikal.

Pemilu 2024, dengan segala kompleksitas dan tantangannya, harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat demokrasi. Dengan kesadaran kolektif akan risiko radikalisme dan komitmen untuk menjaga integritas demokrasi, masyarakat Indonesia dapat melangkah maju menuju masa depan yang lebih kuat dan berkeadilan.

Langkah ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas bersama bagi seluruh elemen masyarakat yang menghargai nilai-nilai demokrasi sebagai fondasi utama kemajuan bangsa.

Seiring dengan itu, perlunya mengembangkan kebijakan yang inklusif dan progresif menjadi kunci dalam menghadapi kompleksitas tantangan demokrasi. Pemerintah memiliki peran sentral dalam menyusun regulasi yang mendukung prinsip-prinsip demokrasi, namun juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut melibatkan input dari berbagai lapisan masyarakat. Keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan dapat memberikan legitimasi yang kuat dan menciptakan rasa memiliki terhadap institusi demokratis.

Tantangan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 juga mencakup pembangunan inklusivitas politik. Masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang, suku, agama, dan gender harus merasa diperhatikan dan diwakili dalam proses politik. Inklusivitas politik bukan hanya tentang keterlibatan sebagai pemilih, tetapi juga tentang mewujudkan representasi yang seimbang di tingkat kebijakan dan lembaga-lembaga negara.

Pada tingkat yang lebih luas, keberlanjutan demokrasi melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam upaya membangun budaya politik yang sehat. Pembangunan budaya politik ini dapat dimulai melalui dialog antarumat beragama, peningkatan kesadaran hak asasi, dan pemberdayaan perempuan dalam arena politik. Dengan cara ini, masyarakat dapat merajut hubungan sosial yang kuat, mencegah polarisasi, dan membangun kebersamaan dalam keberagaman.

Adapun untuk menjaga keseimbangan informasi dalam media, diperlukan upaya bersama antara pemerintah, industri media, dan masyarakat. Mendorong praktik jurnalisme yang etis, mendukung keberlanjutan media independen, dan memberikan literasi media kepada masyarakat adalah langkah-langkah konkret dalam memitigasi risiko penyebaran ideologi radikal.

Tak kalah pentingnya adalah pembangunan keamanan siber yang kokoh. Dengan

teknologi yang semakin canggih, ancaman terhadap integritas proses pemilu melalui serangan siber semakin nyata. Investasi dalam teknologi keamanan siber dan peningkatan literasi digital akan memastikan bahwa Pemilu dapat berlangsung tanpa gangguan yang merugikan.

Melangkah lebih jauh, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program-program keberlanjutan demokrasi dapat menciptakan ekosistem yang mendukung. Forum-forum dialog yang berkelanjutan dan mekanisme konsultasi publik akan memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakomodasi.

Sebagai sebuah bangsa yang merayakan keberagaman, menjaga keberlanjutan demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau segelintir individu, melainkan sebuah perjalanan bersama.

Dengan memandang Pemilu 2024 sebagai momentum untuk merajut kembali nilai-nilai demokrasi, Indonesia dapat melibatkan seluruh masyarakat dalam membangun masa depan yang berkeadilan, inklusif, dan kokoh di tengah-tengah arus radikalisme yang mengancam NKRI.